

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bryen A Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (Minnesota: West Group)
- Harifin A. Tumpa, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- J.E Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Jakarta:Rajawali Press
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: KOMPAS
- Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa*, (Jakarta:Institute for Criminal Justice Reform)
- Moh. Taufik Makarao, dkk., 2002, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*. (Jakarta: PT Rineka Cipta)

- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2016, *Update Hukuman Mati di Indonesia 2016*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform)
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persaja
- Yon Atriano Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Artikel atau Jurnal:

- Amnesti Internasional, 2017, "*Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016*", Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK Indeks: ACT 50/5740/2017 Bahasa Indonesia, Bahasa asli: Bahasa Inggris
- Ban Ki-moon, UN Secretary-General, 2014, "*Hukuman mati tidak memiliki tempat di abad ke-21*" (*Berpaling dari Hukuman Mati: Kajian dari Asia Tenggara*)
- Info Singkat Hubungan Internasional, 2015, "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran", Vol. VII, No. 09/I/P3D/Mei 2015
- Jan Pronk, *Death Penalty Has No Place in the 21st Century*, Lecture Andalas University, Padang, Indonesia, 25 September 2015
- Jurnal Legislasi Indonesia, 2015, *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam Tinjauan*

Yuridis Normatif), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

Jo Lennan and George Williams, “*The Death Penalty in Australian Law*”,
SYDNEY LAW REVIEW

KONTRAS, 2008, “*Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di
Indonesia*”.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, (Marry E. Williams, book
editor), 2000, *Capital Punishment*, Greenhaven Press, Inc., PO Box
289009, San Diego, CA 92198-9009 Printed in the U.S.A

Mei Susanto & Ajie Ramdan, 2017, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati Kajian
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007” (The
Moderation Policy Of Capital Punishment An Analysis of Constitutional
Court’s Decision Number 2-3/PUU-V/2007)

The Parlement of the Commonwealth of Australia, 2016, “*A world without the
death penalty, Australia's Advocacy for the Abolition of the Death
Penalty*”

Ricardo Ampudia, 2010, *Maxicans on Death Row*, (Arte Publico Press:University
of Houston)

UNODC, 2008, *Drug Policy and Results in Australia*

Website:

Arie Siswanto, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional*,
[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie%20Si
swanto_Pidana%20Mati%20Dalam%20Perspektif_Full%20text.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie%20Siswanto_Pidana%20Mati%20Dalam%20Perspektif_Full%20text.pdf)
diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 17.17

Berita Online pada Merdeka.com, Minggu, 8 Oktober 2017 “Vonis hukuman mati di Indonesia meningkat dua kali lipat di tahun 2017”, diakses tanggal 5 Januari 2018, pukul 10.57.

Berita Online pada VOA Indonesia, 2015, “Eksekusi di Indonesia Picu Kemarahan Australia, Brasil, diakses dalam <https://www.voaindonesia.com>, pada 05 April 2018, pukul: 00.17

CDPP Australia’s Federal Prosecution Service, *Drug Trafficking, Selling and Cultivation*, diakses pada <http://www.cdpp.gov.au>, pada 26 Maret 2018, pukul 15.00 WIB

Susilo Wardani, *Politik Hukum Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Indonesia*, <https://hukum.ump.ac.id/images/pdf/ARTIKEL6.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2017, pukul 10.27 WIB

Kiki Rizki Andini, “*Kerjasama UNODC Dengan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Narkobas di Indonesia*” ejournal.hi. Volume 3, Nomor 2, 2015, <http://www.portal.fisip-unmul.ac.id>, diakses pada tanggal 02 April 2018, pukul 20.12 WIB

Law Council of Australia, *Death Penalty*, diakses melalui <https://www.lawcouncil.asn.au/policy-agenda/human-rights/death-penalty>, pada 18 Maret 2018, pukul 20.57 WIB

Waris Anjari, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, www.e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/download/208/184 diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul: 10.36 WIB

Peraturan Nasional:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan MA No 38/PK/PID.SUS/2011

Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Peraturan Internasional:

*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 As amended by the 1972 Protocol
amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*

*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, 1988*

International Covenant and Civil and Political Rights (ICCPR)

*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political
Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty*

Controlled Substances Act 1984 (SA)

